
CAKRAWALA PENDIDIKAN

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN

●
PENERAPAN KONSEP DAN PRINSIP PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
(contextual Teaching and Learning/CTL)
DAN DESAIN PESAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR

●
KERENTANAN SISWA MELAKUKAN KEKERASAN MASSA LATAR BELAKANG
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

●
MODEL PENANGANAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR SPESIFIK KARENA
FAKTOR DISFUNGSI MINIMAL OTAK (DMO) DI SEKOLAH DASAR

●
PARADIGMA PENDIDIKAN DESAIN DI INDONESIA

●
THE IMPACT OF TEACHING EXPERIENCE, EDUCATION LEVEL AND PARTICIPATIVE
DECISION MAKING OF TEACHING STAFFS ON STUDENT OUTCOMES
IN ACCOUNTING DEPARTMENT AT PRIVATE COLLEGE

●
MANAJEMEN PENDIDIKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN

●
HUBUNGAN ANTARA MINAT WIRAUSAHA DENGAN BIMBINGAN
JABATAN DAN SIKAP KEMANDIRIAN SISWA

●
PERANAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*Life Skill*) DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN TERDIDIK.

●
METODE PEMBELAJARAN PENJAS YANG MENARIK, MENGGEMBIRAKAN, DAN
MENCERDASKAN

NOMOR ISSN : 0216 - 1370

PENERBIT
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Kependidikan

Visi : Menumbuhkan cakrawala berpikir partisipatif dalam pembangunan nasional melalui IPTEKS

Misi : Pemberdayaan dan penajaman orientasi masyarakat pendidikan Indonesia dalam pembangunan nasional

Terbit 3 kali setahun pada edisi Februari, Juni dan November
Berisi kajian ilmiah dan hasil penelitian tentang pendidikan

Penanggung Jawab Penyunting
Sukidjo

Ketua Penyunting
Sodiq Azis Kuntoro

Sekretaris Penyunting
Pardjono

Penyunting Pelaksana
Kastam Syamsi
Bambang Priyanto

Penyunting
Wuryadi
Darmiyati Zuchdi
Husain Haikal
Sumarno
Bambang Subali
Abdul Gafur D.A.
Nurfina Aznam
Soeharto
Wawan Sundawan Suherman

Penyunting Ahli
Sabarti Akhadiah (Universitas Negeri Jakarta)
Djohar (Universitas Negeri Yogyakarta)
P.H. Dewanto (Universitas Negeri Semarang)
Said Hamid Hasan (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Musa Asy'arie (IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Supriyoko (UST Taman Siswa Yogyakarta)

Perancang Kulit
Amri Yahya

Sekretariat
Supantoro
Indarti
G. Heru Sutrisno
Widiyanto
Suprpto
Ganjar Triyono
Hidayati

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : LPM Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang,
Yogyakarta 55281, Telepon : (0274) 550838, 586168 Psw.233, Fax. (0274) 550838

ISSN : 0216 -1370

Semua tulisan yang ada dalam **Cakrawala Pendidikan** bukan merupakan cerminan sikap dan atau pendapat Penyunting Pelaksana, Penyunting, dan Penyunting Ahli. Tanggung jawab terhadap isi dan atau akibat dari tulisan, tetap terletak pada penulis.

November 2003, Th. XXI. No.3

CAKRAWALA PENDIDIKAN

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 02/Dikti/Kep/2002, tanggal 7 Januari 2002, tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa *Cakrawala Pendidikan (CP)* telah terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional sampai dengan Januari 2005

PENERBIT
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Penerapan Konsep dan Prinsip Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dan Desain Pesan dalam Pengembangan Pembelajaran dan Bahan Ajar Oleh: Abdul Gafur	273-289
2. Kerentanan Siswa Melakukan Kekerasan Massa Latar Belakang dan Upaya Penanggulangannya Oleh: DYP Sugiharto	291-311
3. Model Penanganan Anak Berkesulitan Belajar Spesifik karena Faktor Disfungsi Minimal Otak (DMO) di Sekolah Dasar Oleh: Haryanto	313-330
4. Paradigma Pendidikan Desain di Indonesia Oleh: Iswahyudi	331-353
5. The Impact of Teaching Experience, Education Level and Participative Decision Making of Teaching Staffs on Student Outcomes in Accounting Department at Private College Oleh: Sukirno DS	355-377
6. Manajemen Pendidikan Pembinaan Anak Jalanan Oleh: Mundilarno	379-399
7. Hubungan Antara Minat Wirausaha dengan Bimbingan Jabatan dan Sikap Kemandirian Siswa Oleh: Tidjan	401-413
8. Peranan Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Life Skill</i>) dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik Oleh: Sukidjo	415-439
9. Metode Pembelajaran Penjas yang Menarik, Menggembirakan dan Mencerdaskan Oleh: Wawan S. Suherman	441-449

Biodata Penulis

PERANAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) DALAM MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK

Oleh : Sukidjo*

ABSTRACT

Economic crisis result in rate of growth down and raise an unemployment. A lot of student get drop out and the alumni is difficulty for got a job, so they will be an educated unemployment. It is caused they had not skill which it is needed by bisnis and industry institution. To solve the problem, the student should should be given life skill education.

In fullfiling that need above, in every region or district should be built a training and education institute, it call community college which it is able to run life skill that it is relevance with their need. After finishing attending lesson in community college, the student or paticipant was given a certificate that explain how their competence that were achieved.

The skill vocational (SV) program which is developing in community college consist of are: SV - A and B for the alumni junior and senior high school who not to continue to school, SV-C and D for the student is still studying but they will not continue their school and SV-E program for drop out student and population in general.

Key words : Life Skill, unemployed intellectual.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk

* Staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS Universitas Negeri Yogyakarta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pendapatan riil per kapita. Seseorang akan memperoleh pendapatan apabila yang bersangkutan memiliki aktivitas ekonomi baik dalam kegiatan bidang produksi maupun jasa. Dengan kata lain agar seseorang memperoleh pendapatan, yang bersangkutan ia harus bekerja. Sebaliknya, jika menganggur yang bersangkutan tidak memperoleh pendapatan. Pengangguran merupakan masalah sosial yang kompleks. Meningkatnya pengangguran mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, tuna wisma, anak jalanan dan gelandangan, serta mengakibatkan timbulnya berbagai tindak kejahatan, kriminalitas dan berbagai tindakan asusila lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha keras untuk selalu berusaha mengurangi pengangguran dengan cara memperluas kesempatan kerja.

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997 ternyata sampai dengan awal tahun 2003 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Telah banyak lembaga perbankan maupun perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan jatuh pailit, berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menambah jumlah pengangguran yang telah ada. Jumlah pengangguran akan semakin banyak karena bertambahnya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1988 pengangguran terbuka (*open unemployment*) berjumlah 5,1 juta jiwa dan dalam tahun 1988 tersebut jumlah angkatan kerja yang baru masuk sebanyak 2 juta sehingga jumlah pengangguran terbuka pada akhir tahun 1988 sebanyak 7.1 juta jiwa. Dalam awal tahun 2003 jumlah pengangguran telah mencapai 40 juta orang dan dari jumlah tersebut sebanyak 9,1 juta orang benar-benar

penganggur yakni tidak memiliki usaha atau pekerjaan sama sekali yang berarti merupakan pengangguran terbuka (Kompas, 2 Juli 2003). Bertambahnya jumlah pengangguran secara langsung mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan perkiraan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) jika keadaan perekonomian Indonesia tidak membaik, maka dua pertiga penduduk Indonesia akan hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya krisis ekonomi, hampir semua sektor ekonomi Indonesia mengalami penurunan, akibatnya sebanyak 53% penduduk pedesaan dan 39% penduduk perkotaan akan berada dalam kemiskinan (Kompas, 1-9-1998). Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut Gunawan Sumadiningrat (1999 : 90), pada tahun 1990 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15% atau 27 juta jiwa turun menjadi 11% atau menjadi 22 juta jiwa pada tahun 1996. Dengan adanya krisis ekonomi pada semester pertama tahun 1998, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan naik menjadi 37% dari 202 juta penduduk dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 66% dari jumlah penduduk, melebihi jumlah penduduk miskin yang ada pada tahun 1976 yakni sebesar 40,1% atau sekitar 54,2 juta jiwa.

Pemerintah menyadari meningkatnya pengangguran merupakan salah satu ancaman yang harus segera diatasi. Berbagai tindakan kriminal, kejahatan dan kekerasan akan mudah terjadi sebagai dampak dari kombinasi adanya kenaikan harga, pengangguran massal dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, dalam Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004, Pemerintah berketetapan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menghadapi berbagai kendala antara lain tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja belum memadai (Propenas, 2001: 55).

Dewasa ini pemerintah Indonesia menghadapi masalah yang sangat rawan yakni berupa pengangguran tenaga terdidik baik lulusan pendidikan tinggi maupun sekolah menengah. Hal ini merupakan suatu ironi, sebab banyak lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah tetapi bersamaan dengan itu pengangguran semakin meningkat sejalan dengan tingkat pendidikan. Di satu pihak banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja, di lain pihak banyak lulusan menganggur karena keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan kata lain terjadi *misslink dan mismatch*, tidak ada relevansi antara lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Akibatnya terjadi pengangguran terdidik.

Sementara itu pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dipandang dapat membantu memecahkan masalah pengangguran. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dimaksudkan untuk memberikan berbagai kecakapan, seperti kecakapan sosial, kecakapan komunikasi, kecakapan vokasional dan sebagainya, yang kesemuanya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah pengangguran.

Berdasar latar belakang masalah tersebut, dalam makalah ini dikaji (1) masalah pengangguran beserta sebab-sebabnya, (2) peranan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dalam mengatasi pengangguran dan (3) implementasi pendidikan *life skill* melalui *community college*.

MASALAH PENGANGGURAN BESERTA SEBAB SEBABNYA

Jika seseorang pada jam kerja ternyata ada di rumah dan tidak memiliki pekerjaan, kita tidak dapat dengan serta merta mengatakan bahwa orang yang bersangkutan adalah pengangguran. Banyak dijumpai orang yang tidak mempunyai pekerjaan namun tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Untuk memberikan batasan tentang pengangguran tidaklah mudah, mengingat definisi bekerja sangat longgar sehingga batas antara orang yang bekerja dengan pengangguran sangat tipis. Biro Pusat Statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu sebelum pencacahan (Dumairy, 1996: 75). Nampaknya belum ada kesepakatan antar negara tentang definisi bekerja terutama dalam menentukan berapa jam seseorang dapat digolongkan dalam kelompok bekerja. Karena demikian kecilnya standar minimum ukuran jam dalam definisi bekerja di Indonesia maka jumlah pengangguran di Indonesia seakan –akan lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain, karena standar minimum jam kerja di negara lain lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.

Untuk mendapatkan pemahaman tentang pengangguran perlu dibedakan antara tenaga kerja dan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Penentuan batas usia kerja satu negara dengan negara lain juga tidak sama. Indonesia pada mulanya menentukan batas usia kerja adalah umur 10 tahun ke atas, dan sejak tahun 1995 batas usia kerja adalah umur 15 tahun ke atas, dan di Amerika Serikat adalah umur 14 tahun ke atas. Sedangkan India menentukan batas usia kerja dengan menggunakan rentang umur 14 – 60 tahun, dan Bank Dunia menggunakan rentang antara

15- 64 tahun (Dumairy, 1996: 74). Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Di lain pihak penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan atau tidak akan mencari pekerjaan adalah bukan angkatan kerja. Para siswa yang sedang sekolah, para mahasiswa yang masih kuliah serta ibu-ibu rumah tangga (bukan wanita karir) para pensiunan termasuk bukan angkatan kerja. Oleh sebab itu angkatan kerja yang tidak bekerja namun masih atau sedang mencari pekerjaan adalah pengangguran.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*under unemployment*). Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah memberikan definisi baku tentang pengangguran dan setengah pengangguran, yakni dengan menggunakan tiga kriteria yang terdiri atas tidak bekerja, bersedia bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penganggur terbuka (*open unemployment*) adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (Kompas, 15 Mei 2001). Setengah penganggur (*under unemployment*) dapat dibedakan menjadi setengah penganggur terpaksa dan setengah penganggur sukarela. Setengah penganggur terpaksa adalah seseorang yang bekerja kurang dari jam normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Setengah penganggur sukarela adalah seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Standar atau curahan jam minimum bekerja adalah 35 jam per minggu. Selain menggunakan standar atau

curahan jam minimum untuk mengukur setengah pengangguran dapat juga digunakan ukuran sesuai tidaknya produktivitas yang dihasilkan, maupun tingkat penghasilan yang diperoleh dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, produktivitasnya rendah, ataupun penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan kemampuan atau pendidikan yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Penganggur meliputi pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

**Tabel 1. Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia
Tahun 2000 dan Tahun 2001**

No.	Keterangan	Tahun 2000 (orang)	Tahun 2001 (orang)	Perubahan (%)
1.	Angkatan kerja	95.650.961	98.812.448	3,31
2.	Bekerja	89.837.730	90.807.417	1,08
	a. Sementara tidak bekerja	1.690.243	2.474.601	46,41
	b. Setengah penganggur	30.092.170	27.736.427	(7,38)
	c. Bekerja penuh	58.055.317	60.596.389	4,38
3.	Pengangguran terbuka	5.813.231	8.005.031	37,70

Sumber : BPS, Sakernas 2000, 2001
Kompas, 20-11-2002

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa angkatan kerja tahun 2001 naik sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2000, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja hanya naik 1,08 % dan sebanyak 2,23% angkatan

kerja terpaksa tidak mendapatkan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran terbuka. Pada saat yang sama jumlah pengangguran terbuka naik sebanyak 37,7% atau sejumlah 2.191.800 orang dari 5.813.231 orang pada tahun 2000 naik menjadi 8.005.031 orang pada tahun 2001. Jumlah pengangguran total (pengangguran terbuka dan setengah pengangguran) pada tahun 2000 sebanyak 37.545.644 orang atau naik menjadi 38.215.609 pada tahun 2001 atau sekitar 38% dari angkatan kerja. Menurut ILO batas aman tingkat pengangguran suatu negara adalah 20%. Dengan menggunakan standar ILO, maka tingkat pengangguran yang terjadi sudah mengkhawatirkan sebab telah jauh melampaui standar yang ditetapkan ILO. Jumlah pengangguran ini masih akan bertambah karena masuknya angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan. Dalam tahun 2001 jumlah angkatan kerja baru diperkirakan sebesar 2,3 juta orang, dan jika tidak mendapatkan kesempatan kerja maka akan menambah jumlah pengangguran yang telah ada. Disadari bahwa pada setiap negara memiliki pengangguran, hanya saja besarnya tingkat pengangguran berbeda-beda. Adanya pengangguran pada setiap negara disebabkan adanya kesengajaan atau secara sukarela dari sebagian penduduk yang lebih senang menganggur dari pada bekerja. Pengangguran demikian disebut pengangguran sukarela (*unvoluntary unemployment*). Pengangguran sukarela dapat terjadi karena berpindahnya seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dimana selama yang bersangkutan belum memperoleh pekerjaan baru maka mereka menganggur. Pengangguran yang disebabkan oleh perpindahan pekerjaan disebut pengangguran friksi (*frictional unemployment*). Adapun profil ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu 1996-2001 nampak dalam tabel berikut.

Tabel 2. Profil Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 1996-2002
(dalam ribuan)

Keterangan	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
Angkatan kerja	90.109	89.602	92.734	94.843	95.650	98.812	100.77
Bekerja	85.701	85.405	87.672	88.816	89.837	90.807	91.55
Menganggur	4.407	4.197	5.062	6.030	5.813	8.005	9.13
Pengangguran(%)	4,89	4,68	5,46	6,36	6,08	8,10	9,06

Sumber : Tempo, 25 Mei 2003

· Kwik Kian Gie, Kompas, 10 September 2003

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1997 terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka, yakni sejumlah 4.197.000 orang (4,68%) naik menjadi 8.005.000 orang (8.10 %) pada tahun 2001 dan bertambah lagi menjadi 9.130.000 orang (9.06%) pada tahun 2002. Dengan kata lain dalam kurun waktu enam tahun jumlah pengangguran terbuka menjadi dua kali lipat. Jumlah pengangguran terbuka ini akan bertambah terus dengan masuknya angkatan kerja baru. Menurut Kwik Kian Gie, diproyeksikan pada tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka kurang lebih 11,19 juta orang atau 10,45% dari angkatan kerja. Oleh sebab itu diperlukan berbagai usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru khususnya pada bidang manufaktur. Kesempatan kerja akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebagai akibat makin tingginya aktivitas ekonomi yang memerlukan tambahan tenaga kerja. Secara teori, setiap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1 (satu) persen akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 400.000 orang. Oleh sebab itu, untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja 2,3 juta orang maka laju

pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat tumbuh sebesar 6%. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi rata-rata hanya 3%, sehingga hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,2 juta akibatnya 1,1 juta angkatan kerja baru menambah jumlah penganggur yang telah ada.

Pengangguran dapat diklasifikasikan atas dasar kemauannya dan faktor penyebabnya. Berdasarkan atas kemauannya, pengangguran dibedakan menjadi pengangguran terpaksa dan pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela ini dapat terjadi karena faktor nonekonomi, misalnya kondisi dan lingkungan kerja yang tidak sesuai, hubungan karyawan dan pimpinan kurang harmonis, maupun iklim kerja yang kurang baik. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi pengangguran friksional, musiman, konjungtural, teknologis, struktural, dan pengangguran khusus (Suroto, 1992: 197-208). Pengangguran terdidik adalah penganggur yang memiliki tingkat pendidikan tertentu karena kemampuan dan keahliannya tidak sesuai dengan persyaratan yang diinginkan dunia kerja dan industri.

Menurut Wibowo (2002), setelah terjadinya krisis ekonomi Indonesia masih menghadapi tiga masalah besar tentang pengangguran, yakni akumulasi pengangguran, pengangguran terdidik dan pengangguran usia muda. Akumulasi pengangguran terjadi di satu pihak sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan baik yang berupa pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung dan di pihak lain masuknya angkatan kerja baru dalam pasar tenaga kerja. Jumlah pengangguran pada tahun 2001 telah mencapai 30% dari angkatan kerja, dimana kondisi ini sudah berada dalam tahap yang kronis mengingat batas aman tingkat pengangguran suatu negara yang ditetapkan oleh ILO hanyalah 20%. Pengangguran terdidik merupakan

pengangguran para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi sebagai konsekuensi adanya kesenjangan antara banyaknya lulusan dengan terbatasnya lapangan kerja serta ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan persyaratan yang diperlukan dalam dunia usaha dan industri.

Menurut Pandia (2003) disebutkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran berpendidikan di atas SLTA sebanyak 6.9%, berpendidikan SLTA (35,6%), pengangguran berpendidikan SLTP sebanyak 21%, berpendidikan SD sebanyak 24%, seperti nampak dalam tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah (Nopember 2002)

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
< SD	10,3 %	15,2 %	7,3 %	19,2 %	12,4 %
SD	23,2 %	25,3 %	15,8 %	35,0 %	24,1 %
SLTP	22,5 %	19,2 %	20,2 %	22,1 %	21,0 %
SLTA	37,7 %	32,7 %	46,1 %	21,7 %	35,6 %
> SLTA	6,3 %	7,7 %	10,6 %	2,0 %	6,9 %

Sumber : BPS ; Kompas , 2 Juli 2003

Sementara itu, dalam bulan September 2003 Kwik Kian Gie (2003) menyampaikan data tentang pengangguran dilihat dari segi tingkat pendidikannya yang intinya tidak jauh berbeda dengan data pengangguran yang disampaikan oleh Agnes Swetta Pandia. Adapun data yang disampaikan Kwik Kian Gie selengkapnya sebagai berikut.

Sebenarnya pemerintah telah menyadari bahwa masih banyak lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan, disebabkan kurangnya keterampilan dan pengalaman. Dengan kata lain para lulusan pada dasarnya belum siap memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja antara lain di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Namun sayang, nampaknya sulit untuk mengetahui berapa banyak para peserta pelatihan di BLK yang telah bekerja dan berapa banyak yang masih menganggur, karena tidak tersedia data yang jelas. Selain itu belum ada peta sektor-sektor mana yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pengangguran tidak hanya terjadi pada angkatan kerja yang berpendidikan rendah, namun masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja seperti ditunjukkan pada tabel 4. Pada tingkat LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) terjadinya pengangguran terdidik dapat disebabkan kurangnya koordinasi antara lembaga produsen guru (LPTK) dengan kebutuhan konsumen (sekolah-sekolah). Jumlah guru bidang studi atau tenaga kependidikan lainnya yang dihasilkan LPTK sering tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan sekolah. Akibatnya terjadi banyak guru pada bidang studi tertentu menganggur dan di pihak lain banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru bidang studi tertentu. Dalam tahun 2002 terdapat 300.000 sarjana dari berbagai bidang studi yang menganggur dan jika ditambah dengan lulusan diploma jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai setengah juta orang. Jika ditelusuri bahwa salah satu penyebab pengangguran terdidik karena tergoncangnya sektor manufaktur sebagai dampak krisis ekonomi (Tempo, 25 Mei 2003) Demikian juga yang terjadi pada

lembaga pendidikan non LPTK. Perguruan tinggi banyak menghasilkan lulusan namun lapangan kerja sangat terbatas serta kualitas dan keahlian yang dihasilkan perguruan tinggi belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tidak jarang dunia industri mengkritik perguruan tinggi karena lulusan yang dihasilkan ternyata belum siap kerja dan dikatakan perguruan tinggi baru dapat memberikan bekal ijazah dan belum dapat memberikan keterampilan yang diperlukan dunia usaha.

Menyadari masih banyaknya lulusan yang masih menganggur, dan di lain pihak terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, maka pemerintah mengadakan reformasi pendidikan, yakni diterapkannya Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup yang lebih dikenal dengan istilah *life skill*. Dengan *life skill*, anak didik selain disiapkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di satu pihak, anak didik disiapkan pula untuk dapat memasuki lapangan kerja yang disediakan oleh dunia usaha dan dunia industri ataupun dapat menciptakan lapangan kerja dengan cara membuka usaha secara mandiri.

PERANAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILL*) UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN

Salah satu pertimbangan yang mendasari diterapkannya Pendidikan Berorientasi kecakapan Hidup atau *life skill* adalah di satu pihak adanya kenyataan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dan di lain pihak pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada bidang

akademik dan vokasional saja, melainkan harus dapat memberikan bekal "*learning how to learn*".

Dewasa ini mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah. Bukti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari laporan International Education Achievement (IEA). Menurut IEA, kemampuan membaca untuk tingkat SD siswa Indonesia berada dalam urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Kemampuan matematika siswa SLTP Indonesia berada dalam urutan ke - 39 dari 42 negara dan kemampuan IPA, Indonesia masuk dalam urutan ke - 40 dari 42 negara peserta. Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN , ternyata posisi Indonesia tetap berada pada urutan bawah. Berdasarkan Laporan Pengembangan Manusia (*Human Development Index = HDI*) oleh UNDP, disebutkan bahwa nilai HDI 2000 : Indonesia mendapat nilai 0,684 atau peringkat 110 di bawah Vietnam yang mendapat nilai 0,688 atau pada peringkat 109, Cina 0,762 (urutan 96), Filipina 0,754 (urutan 77), Thailand 0,762 (urutan 70), Malaysia 0, 782 (urutan 59), Brunei Darusalam 0,856 (urutan 32), Singapura 0,885 (urutan 25) dan Jepang 0,933 atau pada urutan 9 (Tony Widiastono, Kompas, tgl. 2 Mei 2003).

Pemerintah menyadari sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, ternyata mutu pendidikan yang dihasilkan belum meningkat secara signifikan, baik secara internasional maupun nasional. Dengan membandingkan secara internasional, Human Development Index (HDI) Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 106 negara yang disurvei. Hasil survei The Political Economics Risk Consultation (PERC) dilaporkan bahwa posisi Indonesia

berada pada peringkat ke 12 dari 12 negara yang disurvei dan berada satu peringkat di bawah Vietnam. Hasil studi The Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R) dilaporkan bahwa siswa SLTP Indonesia menempati peringkat 32 untuk IPA dan peringkat 34 untuk matematika dari 38 negara yang disurvei (Tim BBE, 2001). Sedangkan indikator yang menggambarkan mutu pendidikan belum meningkat secara nasional, antara lain : (1) NEM SD sampai sekolah menengah relatif rendah, (2) lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja, (3) adanya ketidakpuasan berjenjang, (4) lulusan SLTP dan sekolah menengah banyak yang menjadi penganggur (Indrajati Sidi, 2002: 1). Selain itu, ternyata 88,4% lulusan sekolah menengah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebanyak 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan ke sekolah menengah. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah pengangguran terus meningkat dan keadaan ini akan diperparah dengan masuknya tenaga kerja lulusan SLTP dan sekolah menengah yang tidak mampu melanjutkan sekolah berikutnya. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan mutu dan orientasi pendidikan, dimana lulusan tidak hanya diarahkan sebagai *white color jobs* melainkan perlu disiapkan sebagai pencipta kerja. Salah satu alternatifnya adalah perlunya pendidikan berbasis kecakapan hidup atau *life skills*.

Yang dimaksud dengan kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menentukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Tim Broad-Based Education, 2002 : 9). Kecakapan hidup terdiri atas kecakapan hidup yang bersifat umum atau generik (*general life skill*) dan kecakapan hidup yang bersifat

khusus atau spesifik (*specific life skill*). Kecakapan hidup generik merupakan kecakapan yang diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja maupun mereka yang masih menempuh pendidikan. Kecakapan hidup generik ini dapat dibedakan menjadi kecakapan personal (*personal skill*) dan sosial (*social skill*). Kecakapan personal mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) disebut juga kecakapan kesadaran diri dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*). Sedangkan kecakapan hidup spesifik terdiri atas kecakapan akademik (*academic skill*) dan kecakapan vokasional (*vocational skill*). Dengan demikian, kecakapan hidup meliputi lima kecakapan, yakni personal, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

Kecakapan personal merupakan kecakapan yang berkaitan dengan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Kecakapan berpikir rasional merupakan kecakapan menggali, menemukan, mengolah informasi dan mengambil keputusan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapinya. Kecakapan sosial merupakan kecakapan untuk berkomunikasi dan kecakapan untuk bekerjasama. Kecakapan akademik merupakan kecakapan berfikir ilmiah, antara lain kecakapan mengidentifikasi ubahan, menjelaskan bagaimana hubungan antar ubahan, kecakapan merumuskan hipotesis serta kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. Sedangkan kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat. Kecakapan hidup tidak sama dengan keterampilan bekerja. Kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan bekerja, mengingat kecakapan hidup merupakan kecakapan untuk dapat menghadapi masalahnya sendiri.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI *COMMUNITY COLLEGE*

Pendidikan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM ini penting, karena SDM yang berkualitas akan dapat memperlancar tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi serta mengentaskan kemiskinan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh tingkat pendapatan per kapita. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1981: 13). Namun demikian perlu disadari bahwa dalam mengukur keberhasilan pembangunan jangan semata-mata didasarkan pada keberhasilan meningkatkan pendapatan per kapita. Menurut Budiman (1995: 2-7) ada lima indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kelestarian lingkungan serta keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan

Pendidikan dipandang sebagai faktor penting dalam mengurangi pengangguran serta untuk mensukseskan pembangunan. Sebab makin meningkatnya pendidikan berarti makin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, makin terbukanya wawasan, mobilitas penduduk semakin terbuka serta makin meningkatnya keberanian untuk memanfaatkan peluang usaha. Menurut Todaro (1991: 337) perluasan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan kunci utama pembangunan nasional, dan semakin bertambah pendidikan semakin cepat pembangunan. Bagi masyarakat golongan miskin, pendidikan merupakan jalan satu-satunya untuk mengangkat anak-anak mereka dari kemiskinan dan pengangguran.

Untuk dapat keluar dari lingkaran pengangguran, salah satu alternatif melalui pendidikan khususnya pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup antara lain berupa kecakapan vokasional. Dengan modal kecakapan vokasional, mereka memiliki kemampuan berusaha baik dengan cara bekerja pada orang lain atau mendirikan usaha untuk diri sendiri sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada.

Suatu kenyataan bahwa pada saat ini terdapat beberapa siswa putus sekolah, banyak lulusan SLTP dan MTs, lulusan SMU dan Madrasah Aliyah (MA) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi serta lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Mereka ini akan memasuki pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Mengingat terbatasnya kesempatan kerja serta keterampilannya, maka kemungkinan mereka ini tidak dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Jika hal ini terjadi, kehadiran mereka di pasar kerja justru akan menambah pengangguran. Untuk dapat memasuki pasar kerja, kepada mereka perlu diberikan tambahan keterampilan (vocational skill) sesuai tingkat umur dan kebutuhan pasar kerja. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang bertugas membekali kecakapan vokasional disebut "*community college*"

Community college merupakan wadah atau tempat diselenggarakannya diklat kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan diklat kompetensi diberikan sertifikat. *Community college* disebut juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT). Dikatakan terpadu mengandung pengertian bahwa semua lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang hingga kini menyelenggarakan diklat kompetensi, misalnya SMK, BLK, lembaga kursus dan lembaga diklat lain yang ada di kabupaten / kota harus

sinergi dalam satu sistem baik dari sisi program maupun sertifikasinya. Selain itu, laboratorium SMU/MA yang memiliki sarana dan tenaga ahli yang cukup baik maupun industri dapat bergabung membentuk *community college*. Penggabungan beberapa SMK, SMU, MA, BLK, lembaga kursus serta industri dalam membentuk *community college* hendaknya dilandasi semangat bersinergi yang semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan sedapat mungkin perlu mengurangi semangat egoisme dari masing-masing pihak. Dengan demikian, kesemua instansi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dalam wadah *community college*.

Community college dapat digunakan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan baik untuk siswa yang masih sekolah, atau tamatan sekolah maupun untuk warga masyarakat pada umumnya dengan cara memberikan bekal yang berupa kecakapan vokasional sesuai dengan lingkungan maupun tuntutan pasar kerja. Berbagai kecakapan vokasional tersebut disusun dalam paket-paket program vokasional, yakni paket VS-A, VS-B, VS-C, VS-D dan VS-E. Paket program VS-A merupakan program vokasional untuk lulusan sekolah menengah umum yang tidak melanjutkan pendidikan dan akan memasuki lapangan kerja. Paket program VS-B merupakan program vokasional untuk lulusan SLTP yang tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah dan akan memasuki lapangan kerja. Program VS-A dan B sebaiknya disusun dalam bentuk modul dimana materi modul tersebut hendaknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dengan mempelajari modul-modul tersebut diharapkan siswa dapat langsung menerapkan kemampuan dan keterampilan yang telah diperolehnya di lapangan kerja baik sebagai karyawan

maupun sebagai usaha mandiri. Program VS-C merupakan program vokasional untuk siswa yang masih belajar di SMU/MA, tetapi secara potensial tidak akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kepada siswa-siswa ini sejak di sekolah sudah mendapatkan sejumlah paket program vokasional, yang pelaksanaannya merupakan mata pelajaran/ mata diklat pilihan atau mata pelajaran ekstra kurikuler sehingga tidak menambah jam pada kurikulum. Program VS-D merupakan program vokasional yang diperuntukan bagi siswa-siswa SLTP / MTs yang masih sekolah, tetapi secara potensial tidak akan melanjutkan ke sekolah menengah sehingga mereka ini akan memasuki lapangan kerja. Seperti pada Program VS-C, program VS-D ini sebaiknya diatur sebagai mata pelajaran pilihan atau mata pelajaran ekstra kurikuler. Kepada siswa-siswa ini, sejak di sekolah sudah mendapatkan sejumlah paket vokasional. Sedangkan program VS-E merupakan program vokasional yang diperuntukkan bagi anggota masyarakat pada umumnya serta para remaja putus sekolah. Program VS-E dirancang dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga kursus yang ada di masyarakat.

Dengan diberikan berbagai kecakapan vokasional, para peserta akan memperoleh sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja diharapkan mereka ini dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia sebagai karyawan atau mendirikan usaha sendiri secara mandiri. Diperolehnya pekerjaan baik sebagai karyawan maupun sebagai usaha mandiri, berarti yang bersangkutan memperoleh kesempatan kerja melalui bekerja pada orang lain atau dapat menciptakan lapangan kerja sendiri yang berarti menciptakan lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung mengurangi pengangguran yang ada.

Selain diberikan bekal keterampilan, kepada siswa perlu ditanamkan benar-benar jiwa kewirausahaan sehingga mereka memiliki kecakapan memanfaatkan peluang dan keberanian berusaha, kreatif serta percaya diri. Penanaman jiwa kewirausahaan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Ciri dan watak kewirausahaan, yang meliputi percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi ke masa depan (Meredith, 1992: 5).
2. Ciri dan cara Wirausaha Unggul, yakni (a) berani mengambil resiko serta memperhitungkan dan berusaha menghindarinya, (b) selalu berupaya menghasilkan karya yang terbaik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat dan negara, (c) antisipatif terhadap perubahan, akomodatif terhadap lingkungan, (d) kreatif dan mencari peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan (e) selalu berusaha meningkatkan keunggulan perusahaan melalui investasi baru (Siagian, 1995: 7).
3. Memahami cara merintis usaha baru dan model pengembangannya, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan dan strategi kewirausahaan serta etika bisnis (Sunarya, 2001: 66).
4. Mengenalkan *marketing mix* serta membentuk jaringan pemasaran baik ke industri hulu maupun hilir sehingga terdapat jaminan pengadaan bahan baku maupun pemasaran produk.
5. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pengangguran, maka perlu ada jalinan kerjasama antara *community college* dengan *stakeholder* dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri, sehingga keahlian dan keterampilan yang dipersiapkan oleh *community college* benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dirumuskan kesimpulan antara lain sebagai berikut.

1. Dewasa ini mutu pendidikan di Indonesia berada dalam kategori rendah. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia mengakibatkan sebagian lulusan tidak mampu mengisi lapangan kerja yang tersedia karena kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha dan dunia industri tidak dapat dipenuhi oleh para lulusan. Akibatnya terjadinya pengangguran terdidik tidak dapat dihindarkan.
2. Dalam rangka mengatasi banyaknya lulusan SLTP dan sekolah menengah yang menjadi pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan maka kepada siswa perlu diberikan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup, sehingga siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan melalui *community college* yang merupakan wadah peserta didik untuk dapat mengikuti diklat kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan pasar kerja. *Community college* ini dapat digunakan untuk memberikan layanan program vokasional baik untuk siswa yang masih sekolah tetapi secara potensial tidak akan melanjutkan sekolahnya, untuk siswa yang telah tamat, siswa yang putus sekolah maupun anggota masyarakat pada umumnya. Program vokasional yang dikembangkan dikelompokkan dalam program VS-A, program VS-B, program VS-C, program VS-D dan program VS-E.

4. Selain diberikan kecakapan vokasional, para siswa peserta community college perlu diberikan bekal penanaman jiwa kewirausahaan, antara lain meliputi ciri dan watak kewirusahaan, ciri dan cara wirausaha unggul, strategi mendirikan usaha baru, etika bisnis serta bekal pengenalan strategi pemasaran maupun pembentukan jaringan pemasaran.
5. Untuk menghindari terjadinya misslink and mismatch maka perlu kerjasama yang padu antara community college dengan dunia usaha dan industri sehingga kecakapan dan keterampilan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2001). Penganggur, Bermasalah sejak Definisi. Jakarta : *Kompas 15 Mei 2001*
- Budiman, A. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gie, K. K. 2003. Pengangguran Masih Suram hingga Tahun 2008. *Kompas*, tgl. 10 Septemer 2003
- Jalal, F. dan Dedi, S. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adi Cita.
- Pandia, A. S.. (2003). *Belajarliah dari Pemerintah Filipina dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja*. Kompas, tanggal 2 Juli 2003.
- Siagian, S. (1995). *Kewirausahaan Semangat 17-8-45*. Jakarta : Puslatpenkop

- Sidi, I. (2002). *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education-BBE)*. Jakarta : Ditjen Dikdasmen.
- Sukirno, S. (1981). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Medan : Borta Gorat.
- Sumadiningrat, G. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta : Penerbit Gramedia
- Suroto. (1992). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suryana. (2002). *Kewirausahaan*. Jakarta : Salemba Empat Tempo, tanggal 25 Mei 2003
- Tilaar. H.A.R. (2000). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional : Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang : Indonesia Tiara.
- Tim Broad-Based Education. (2002). *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (life Skill) Melalui Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education-BBE)*. Jakarta : Depdiknas.
- Todaro, P. M. dan Abdullah, B. (1991). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widiastono, T. P. (2 Mei 2003). "Kucing Kucingan dalam RUU Sisdiknas", *Kompas* tgl. 2 Mei 2003